

Press Release INDEF**“Tantangan Mendorong Pertumbuhan dan Menarik Investasi di Tahun Politik”**

Kamis, 7 Februari 2019

Tanpa terasa 4 tahun Pemerintahan Jokowi - JK berlalu di tengah gejolak ekonomi eksternal dan beragam tantangan ekonomi yang sangat dinamis. Di tengah sederet janji pembangunan yang telah diikrarkan Presiden sejak awal periode kepemimpinan termasuk menargetkan pertumbuhan ekonomi meroket hingga 7% per tahun, INDEF selalu mengawal dan mengkritisi tiap capaian pemerintah dengan sudut pandang yang berimbang. Oleh karena itu, press release ini bertujuan untuk memberi analisis dan masukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi terkait capaian sejumlah indikator ekonomi 2018 dan rekomendasi kebijakan ekonomi tahun 2019.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah analisis dan catatan kritis sebagai early warning sekaligus masukan bagi Pemerintah dan para pemangku kepentingan atas perkembangan impor gula saat ini.

Pada bulan Februari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah merilis sejumlah indikator ekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 dan kinerja perdagangan tahun 2018. Selain itu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga sudah merilis data realisasi investasi tahun 2018. Berdasarkan sejumlah data yang sudah rilis oleh BPS dan BKPM tersebut, Indef mencatat sejumlah evaluasi terhadap kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2018, antara lain adalah:

1. Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi

- i. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,17%, jauh lebih rendah dari target pemerintah yang tercantum dalam APBN 2018 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,4 %. Padahal, Indef sudah memberikan masukan pada akhir tahun 2017 bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di APBN terlalu optimis. Hal ini terbukti dimana realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sesuai dengan proyeksi yang dibuat INDEF pada akhir tahun 2017 dimana pada saat itu Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 akan mencapai 5,1%. Lebih dari itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014-2018 pun hanya berkisar 5%. Bahkan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan ASEAN yang mampu tumbuh lebih dari 5%. Sehingga tidak optimalnya akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan faktor eksternal.

- ii. Reformasi birokrasi dan 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah digulirkan pemerintah terbukti belum efektif mendorong produktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari kinerja pertumbuhan Industri Pengolahan yang tumbuh lebih rendah di bawah pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertumbuhan Industri Pengolahan justru menurun dari 4,29% pada tahun 2017 menjadi 4,27% pada tahun 2018. Lebih mencemaskan lagi, sumbangan Industri Pengolahan terhadap PDB pun semakin menciut dari 20,16% (2017) menjadi 19,86% (2018), terendah sejak tahun 2001 yang menyentuh 29,05%. Padahal sektor Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 18,25 juta jiwa atau 14,72% terhadap total tenaga kerja Indonesia per Agustus 2018.
- iii. Meskipun pertumbuhan Sektor Pertanian sedikit meningkat dari 3,87% (2017) menjadi 3,91% (2018). Namun, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB terus menyusut dari 13,48 (2016), 13,15% (2017), hingga menjadi 12,81% (2018). Padahal Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja mencapai 35,70 juta jiwa atau 28,79% terhadap total tenaga kerja per Agustus 2018.
- iv. Dalam hal Produk Domestik Bruto sisi Pengeluaran, Indef mencatat sejumlah poin kritis.
 - a. *Pertama*, pada tahun 2018, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) hanya sebesar 32,29 persen. Walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 (32,17 persen), namun kontribusinya masih rendah dibandingkan pada tahun 2015 dimana pada saat itu kontribusi PMTB mampu mencapai 32,81 persen. Kontribusi PMTB ini meleset dari target dalam RPJMN 2015-2019 dimana PMTB pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 37,6 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah belum optimal dalam menggeser tulang punggung pertumbuhan ekonomi ke sektor investasi.
 - b. *Kedua*, berdasarkan data BPS, PMTB memang masih tumbuh lebih baik sebesar 6,67% di tahun 2018, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,15%. Pertumbuhan investasi masih disumbang oleh investasi domestik dengan gencarnya proyek proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Sementara itu tantangan di tahun politik adalah menurunnya investasi PMA tidak saja diakibatkan oleh dinamika ekonomi global tapi munculnya kekhawatiran ketidakpastian regulasi khususnya bagi sektor yang berorientasi jangka panjang seperti migas, manufaktur dan perkebunan. Transisi perizinan OSS (Online Single Submission) juga menjadi sebab utama melambatnya realisasi investasi asing. Peran Pemerintah diharapkan lebih optimal dalam memberikan kepastian kebijakan, insentif fiskal yang tepat sasaran, serta evaluasi secara menyeluruh proses reformasi perizinan yang telah berjalan.

2. Rapuhnya Kinerja Ekspor.

- i. Sebagai negara terbuka, Indonesia belum berhasil dalam memanfaatkan keterbukaan ekonomi sebagai mesin pertumbuhan. Sepanjang 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai US\$8,56 miliar.
- ii. Akibat besarnya defisit ini, tentunya menimbulkan tekanan terhadap sejumlah indikator ekonomi, seperti melebarnya defisit transaksi berjalan dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Untuk pertama kalinya sejak 2014, peranan Neraca perdagangan menjadi faktor yang mereduksi pertumbuhan ekonomi, dimana pangasanya -2,5 persen (minus 2,5 persen).
- iii. Ekspor tidak mampu berbuat banyak untuk mendongkrak PDB. Pada 2018, peranan ekspor terhadap PDB hanya mencapai 21,13 persen. Sebagai pembanding, ekspor Thailand dan Malaysia berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap PDB, sedangkan di Viet Nam mencapai 93 persen.

3. Beban Investasi Yang Berat

- i. Investasi langsung 2018 tumbuh lebih baik sebesar 6,67% di tahun 2018, dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,15%. Pertumbuhan investasi masih disumbang oleh investasi domestik dengan gencarnya proyek proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN.
- ii. Memasuki tahun politik, menurunnya investasi PMA tidak saja diakibatkan oleh dinamika ekonomi global tapi munculnya kekhawatiran ketidakpastian regulasi khususnya bagi sektor yang berorientasi jangka panjang seperti migas, manufaktur dan perkebunan. Transisi perizinan OSS (Online Single Submission) juga menjadi sebab utama melambatnya realisasi investasi asing.
- iii. Total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun. Penurunan tersebut dimulai sejak triwulan pertama 2018 kemudian berlanjut hingga triwulan ke-IV.
- iv. Di sisi lain, komponen PMA di PDB masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Investasi asing di Indonesia juga tidak berkualitas, hal ini terlihat dari kinerja investasi yang tidak mendorong produktivitas industri.
- v. Mayoritas investasi asing di Indonesia merupakan market seeking FDI dan resource seeking FDI bukan efficiency seeking FDI atau capabilities seeking FDI. Sebaran lokasi investasi asing mulai menurun di Jawa namun peningkatan di Sumatera.